



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan - perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab.

Kecamatan Mumbulsari sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Pemerintahan, telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendelegasian wewenang atau amanat pada pejabat publik berikut berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, harus diikuti dengan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja, kredibilitas Kecamatan Mumbulsari pada tahun-tahun selanjutnya.2

Jember, Januari 2021


CAMAT MUMBULSARI
H. HAIDORI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Hal :
Cover	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis	5
1. Visi dan misi Kabupaten Jember	5
2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Paniti	5
3. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran	6
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	6
1. Sasaran dan indikator sasaran	7
2. Progam dan Indikator Program	7
3. Kegiatan dan indikator kegiatan	8
C. PENETAPAN KINERJA.....	9
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
C. Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV.PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Rencana Strategis (RS)	26
Lampiran 2. Rencana Kerja Tahun 2020 (RKT 2020)	27
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	28
Lampiran 4. SK. IKU OPD	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Mumbulsari

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2019 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik**
Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Baik** .

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran,

dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Mumbulsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.674.830.966,58 merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 400.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar RP 1.274.830.966,58.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 354.478.761,00 atau 88,62 % dan belanja tidak langsung sebesar Rp 889.672.130.00 atau 69,79 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2019 antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan mempunyai skill
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengadaan pendidikan dan latihan atau Bimtek bagi pegawai yang belum memiliki ketrampilan dan skill
2. Penyediaan sarana prasarana yang memadai

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Mumbulsari

Kinerja Kecamatan Mumbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2019

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Mumbulsari adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Mumbulsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Mumbulsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MUMBULSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Mumbulsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut

:

1. Kecamatan Mumbulsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Mumbulsari dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Mumbulsari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Mumbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Mumbulsari terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Mumbulsari merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Mumbulsari dalam pelayanan publik

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Mumbulsari

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Mumbulsari menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara

Pemerintah dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (Dua) sasaran Kecamatan Mumbulsari pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa

Indikator Sasaran 1 : Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti.

Indikator Sasaran 2 : Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

- a. Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan

Indikator Program :

- 1). Prosentase jumlah pelayanan yang ditangani dengan pelayanan yang ada/ yang didaftarkan.
- 2). Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program :

- 1). Prosentase jumlah pembangunan ditingkat Kecamatan Mumbulsari
- 2). Prosentase jumlah sarana dan prasarana umum
- 3). Prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Mumbulsari
- 4). Prosentase jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan ditingkat Kecamatan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sesuai dengan program kegiatan rutin yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Kegiatan Musrenbang Kecamatan

2. Penyusunan dan Verifikasi RKA – SKPD

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Laporan rutin OPD

3. Sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tersedianya kegiatan rapat koordinasi tingkat Kecamatan

b. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, terdiri kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Personil petugas keamanan dan ketertiban terpenuhi

c. Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan, terdiri kegiatan :

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan).

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah dokumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Mumbulsari Nomor 05 Tahun 2019;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda
Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Jumlah pembangunan di tingkat kecamatan dibagi jumlah pembangunan yang ditangani x 100%	Seksi PMKS Dan Seksi Trantib	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan dengan benar x 100 %	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

PBAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Mumbulsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	B (80 %)	B (70,89 %)	Baik
2	Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti	100%	86,90 %	Baik
		2	Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	90 %	Baik

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2019, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

CONTOH

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2017	Th. 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	B 100	B 75,79	B 79,92

Sumber Data: Laporan SKM Bappeda

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2018	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan	B 100 %	B 91,51 %	Baik

Sumber Data: Seksi Yanmum Kecamatan

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI Th. 2018	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada bidang Pelayanan	B (70,89 %)	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

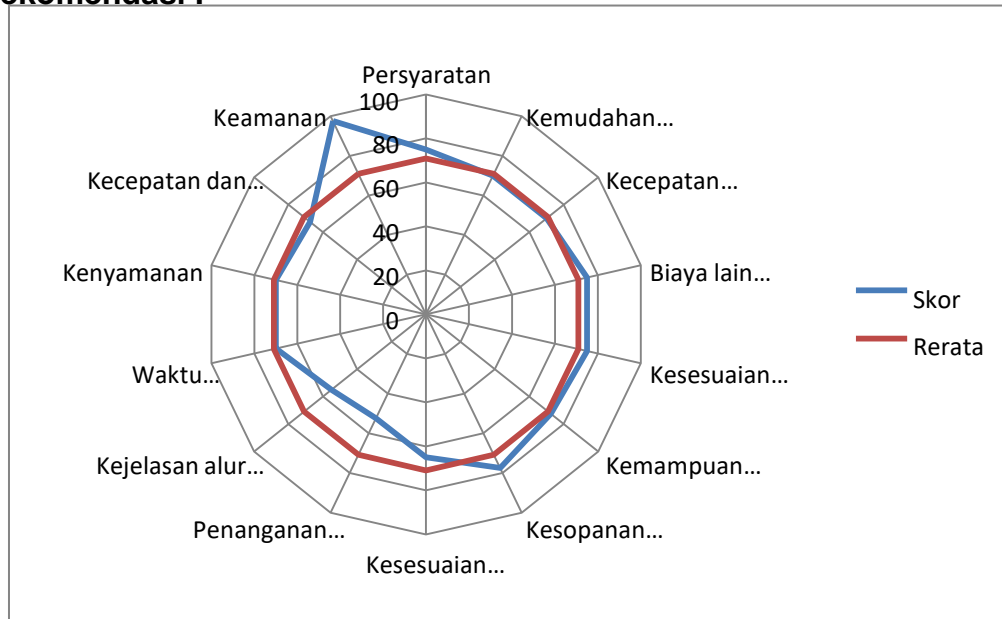
Penjelasan hasil survai adalah sebagai berikut

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan					
2	Kemudahan Prosedur					
3	Kecepatan Pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	0%	40%	20%	40%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	80%	10%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0%	10%	90%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	70%	20%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	10%	30%	50%	10%	100%
9	Penanganan pengaduan dan saran	0%	90%	10%	0%	100%
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	40%	10%	40%	10%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	10%	0%	90%	0%	100%
12	Kenyamanan	0%	30%	60%	10%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	10%	10%	80%	0%	100%

14	Keamanan	0%	0%	10%	90%	100%
----	----------	----	----	-----	-----	------

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	75	Baik
2	Kemudahan Prosedur	70	baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	75	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	75	baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	72,5	baik
7	Kesopanan petugas	77,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	65	baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	52,5	Kurang baik
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	55	Kurang baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	70	baik
12	Kenyamanan	70	baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	67,5	baik
14	Keamanan	97,5	Sangat baik
Rata-rata unsur pelayanan		70,89	baik

Rekomendasi :



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kejelasan alur, penanganan pengaduan dan saran serta kesesuaian standart.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 80 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP (AMBIL DPPA)	Rp 43.600.000,00	Rp 22.100.000,00
Output/Keluaran : Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	KK = 2.500 KTP = 2.500 A.K = 350 S.P = 500 Lain 2 = 2.500	KK = 2.339 KTP = 1.191 A.K = 216 S.P = 471 Lain 2 = 2.209
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Administrasi kependudukan yang dilaksanakan antara lain Perekaman KTP, Pembuatan KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah, Ijin HO, Ijin Galian C dan Lain-lain		

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100%	95,59 %
Output/Keluaran : Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan; Jumlah Peserta rapat koordinasi dan Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	:	550 Orang 6 Dokumen Rakor dan 7 Dok. Lap. Desa	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rapat Koordinasi melibatkan unsur Muspika, Kepala Desa, Kepala Instansi Sektor Kecamatan, Tokoh Masyarakat			

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100%	92,53 %
Output/Keluaran : Jumlah peserta musrenbang; Jumlah Peserta kegiatan PKK;	:	543 Orang	512 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100 %	99,00 %
Output/Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum; Jumlah penerima honor Banpol PP.	:	8	8
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pembinaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum terlaksana dengan baik			

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th.	Th.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1 Persentase hasil rekomendasi angkatan kerja	95,97	95,53	95,79
		2 Persentase Desa yang menyusun penduduk angkatan kerja	3,92	4,47	4,21

Sumber Data: BPS

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1 Persentase penduduk yang bekerja	96,27	95,79	99,50
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73	4,21	83,06

Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2017	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1 Persentase penduduk yang bekerja 2 Tingkat Pengangguran Terbuka	95,79 4,21	94,40 5,61	+ 1.39 (positif) + 1.40 (positif)

Sumber Data: BPS

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 85 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 27.850.000,00		
Output/Keluaran	Pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan anak	100 %	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Persentase Kegiatan Rapat Rutin PKK			

b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 102.000.000,00	100 %	94.02 %
Output/Keluaran	Persentase Kegiatan Ketertiban Keamanan Lingkungan		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Terciptanya peranserta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan			

Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

a. Kegiatan : Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun, Updating dan pemeliharaan)

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 43.600.000,00	100 %	97,06 %
Output/Keluaran	Persentase pelaksanaan perekaman KTP, KK dan Pembuatan Akta Kelahiran dll.		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Persentase masyarakat yang melakukan administrasi kependudukan			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Mumbulsari tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.674.830.966,58 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		Rp. 1,274.830.966,58
b. Belanja Langsung		Rp. 400.000.000,00
- Belanja Pegawai	Rp. 230.550.000,00	
- Belanja Barang/jasa	Rp. 169.450.000,00	
- Belanja Modal	Rp. -	

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 76,12% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 23.88%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Mumbulsari tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REA I ISA	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.000,000,00	155.167.739	73.89
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000,000.00	13.459.500,00	89.73
2	Kegiatan : Penunjang Tupoksi Kantor	140.000,000.00	121.240.000,00	86.60
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	55.000,000.00	43.864.567,00	79,75
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.700,000.00	29.119.694,00	91.86
1	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/ rumah dinas	5,000,000.00	4.991.000,00	99.82
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	2.500.000,00	2.498.000,00	99.92
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	15,000,000.00	13.939.113,00	92,93
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	9.200,000.00	7.691.581.00	83,60
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,00	12.845.000,00	64.23
1.	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari- hari Besar Nasional	20.000.000,00	12.845.000,00	64.23
IV.	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	138.300.000,00	133.950.000,00	96.85

1.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	37.500.000,00	33.150.000,00	88,40
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan	100.800.000,00	100.800.000,00	100,00
TOTAL		400.000.000,00	354.478.761,00	88,62

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Anggaran Rp. 210.000.000,00,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 210.000.000,00,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 52.50 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Mumbulsari

b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran Rp 31.700.000,00

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan dengan Anggaran Rp 138.300.000,00

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Anggaran Rp 20.000.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 190.000.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 47.50 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Mumbulsari

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Mumbulsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Mumbulsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 17 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 16 indikator dalam kategori baik, dan 1 indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.267.731.971,00 (75,69%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 889.672.130.00 (69.79%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 354.478.761,00 (88,62%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mumbulsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

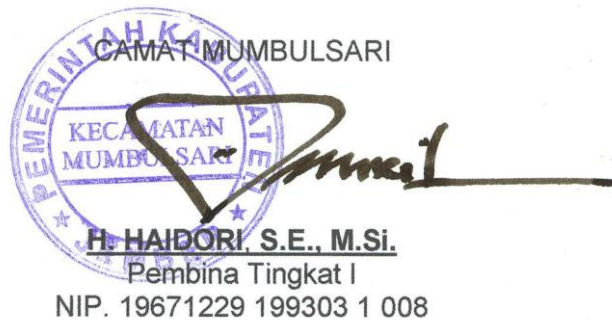
1. Terlambatnya pengesahan penggunaan anggaran
2. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena Perubahan Anggaran Kegiatan dan atau pergeseran kegiatan
3. Kurangnya SDM yang memiliki Skil dan terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan Bimbingan Tehnis atau Diklat sesuai yang dibutuhkan.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai.
3. Pelatihan dibidang I.T (Informasi dan Teknologi).

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2018 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2019.

Mumbulsari, Januari 2020


CAMAT MUMBULSARI
H. HAIDORI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199303 1 008

RENCANA KERJA STRATEGIS (RS) 2016 - 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayananana Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Oreintasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayananana Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan , Ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	80	80	80	80	80	80			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN MUMBULSARI

JL. PB. Sudirman NO. 30 ☎ (0331) 711234 JEMBER 68153

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021

SASARAN		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN Rp
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	85 (B)	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan	Meningkatkan jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diproses/ di layani	12 BULAN	-
Meningkatnya Sasaran koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa	Prosentase rekomendasi Bidang Pemerintahan, Ketenraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan sosial	100%	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam perumusan program pembangunan dan kebijakan layanan publik	6 Kegiatan	20.000.000
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah pembayaran honorarium untuk kegiatan Banpol	12 bulan	145.000.000
				Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam erumusan Program dan Kebijakan layanan Publik	Prosentase meningkatnya partisipasi aktif organisasi perempuan yang dibina meningkat	12 bulan	30,000,000



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
Jl. KH. AgusSalim No. 02 Mumbulsari Telp. (0331) 5444177**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs.SOPONJONO, M.Si
Nip : 19630426 199303 1 004
Pangkat/ Gol : Pembina TK. I / IVb
Jabatan : Camat Mumbulsari

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama,

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR
Jabatan : BupatiJember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


 Pihak Kedua
BUPATI JEMBER

 dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, Februari 2020
 Pihak Pertama

KABUPATEN MUMBULSARI

 Drs.SOPONJONO, M.Si
 19630426 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
CAMAT MUMBULSARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	ENDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Nilai SKM dalam pelayanan Publik	B (100%)
2.	Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Mumbulsari.	1. Presentase rekomendasi hasil koordinasi pelayanan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan social yang di tindaklanjuti dalam 1 tahun 2. Presentase Desa yang sudah menyusun dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	B (100%) B (100%)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 210.000.000,00	ABPD Penghunam
2	Program Peningkatan Sarana dan Pnsarana Aparatur	Rp. 31.700.000,00	ABPD Penghunam
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 20.000.000,00	ABPD Penghunam
4	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Rp. 138.300.000,00	ABPD Penghunam
Jumlah		Rp. 400.000.000,00	APBD





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT MUMBULSARI

Jl PB. Sudirman No. 30 ☎ (0331) 711234 JEMBER 68153

**KEPUTUSAN CAMAT MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/025/35.09.14/2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Mumbulsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Mumbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mumbulsari
Pada tanggal : Januari 2021


CAMAT MUMBULSARI

H. HAIDORI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199303 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Mumbulsari
- Tugas : a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi : a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. penanganan konflik sosial;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati


Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUMBULSARI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMKS dan Seksi Trantib	Hasil koordinasi
		2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

Mumbulsari, Januari 2021


 CAMAT MUMBULSARI
H. HAIDORI, S.E., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671229 199303 1 008